



Kampanye Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia
Silahkan klik dan tandatangi:

<http://www.petitiononline.com/daulat>

INDEKS BERITA

3

Deklarasi SPI Kediri

6

SPI Kecam Penggusuran
dan Pengrusakan
Lahan Petani oleh
PTPN II Sawit Seberang

13

Masyarakat Banten
Tolak Kehadiran Aqua
Danone



*"Kalau petani berdaulat,
negara juga akan berdaulat"*

Dahlan,
Majelis Nasional Petani SPI

Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia



Foto bersama Majelis Nasional Petani (MNP)-Dewan Pengurus Wilayah (DPW)-Badan Pelaksana Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia di Taman Menteng setelah deklarasi Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia (24/02/2011)

PIDATO POLITIK HENRY SARAGIH DALAM PETISI KEDAULATAN PANGAN (24 FEBRUARI 2011) (BAGIAN I)

Hidup Petani !! Hidup Buruh !! Hidup Nelayan !! Hidup Perempuan !!

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena ditengah krisis pangan yang terjadi hari ini, kita gerakan rakyat Indonesia bisa berkumpul di tempat ini untuk menyatakan tekad kita supaya keluar dari krisis pangan ini, dari krisis kapitalisme ini, dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, kepada suatu tatanan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama-tama sekali kepada pengurus SPI yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, pada kesempatan ini bagian dari rapat SPI, kita menyelenggarakan pleno, kemudian menyelenggarakan musyawarah nasional besok dan rapat kerja nasional. Jadi selamat datang di Jakarta ini, tempat dimana kebijakan-kebijakan pertanian dikeluarkan, kebijakan pangan, termasuk kebijakan-kebijakan yang membuat sebagian besar rakyat sengsara di Indonesia.

Hari ini, malam ini, hadir kawan-kawan kita dari Wahana Lingkungan Hidup, Bapak Berry N Furqon, juga yang mewakili Komnas HAM, hadir di sini saudara Nucholis, Saudara Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia, kemudian saudara Budi Laksona dari Serikat Nelayan Indonesia, Ibu Risma dari Solidaritas Perempuan dan saudara kita Gunawan yang mewakili IHCS. Dan banyak rekan-rekan kita yang hadir di sini yang mewakili berbagai kalangan dari gerakan-gerakan pemuda yang selama ini bersama-sama memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Mengapa malam ini kita mencanangkan tentang petisi kedaulatan pangan rakyat Indonesia? Karena kita sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini harus mengambil peran yang sangat aktif untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi hari ini. Sebab krisis pangan bukan saja menimpa bangsa kita, rakyat kita di Indonesia ini, tetapi menimpa di banyak negara di dunia ini. Hampir separuh negara-negara di dunia hari ini mengalami krisis pangan. Dan krisis pangan yang terjadi ini bukanlah suatu hal yang tiba-tiba. Kita, La Via Campesina, dimana Serikat Petani Indonesia bergabung di dalamnya, telah mengingatkan sejak tahun 1996 yang lalu bahwasanya sistem pertanian yang ada, sistem pangan yang ada hari ini, yang mana kita lihat, tidak akan mampu bisa memberi makan rakyat di dunia ini.

Tahun 1996, FAO ketika menyelenggarakan *World Food Summit*, waktu itu jumlah orang yang lapar baru 825 juta orang. Tetapi hari ini, lebih dari 1 miliar orang di dunia ini dalam keadaan kelaparan, 1 miliar orang kurang gizi, dan 1 miliar orang obesitas dan hanya 3 miliar orang yang katakanlah normal makannya. Jadi, angka kelaparan di dunia ini meningkat padahal pimpinan pemerintahan ketika itu menyatakan tekad 2015 nanti mereka akan menghapus 50 persen angka kelaparan di dunia ini. Tetapi rencana itu tidak bisa berhasil, seiring tidak berhasilnya *Millenium Development Goals* juga.

Semuanya ini karena apa? Karena kebijakan pertanian, kebijakan pangan di dunia ini didasarkan kepada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi. Karenanya, La Via Campesina dengan tegas menyatakan tidak, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization*. Tidak, dengan *Free Trade Agreement*. Ratusan aksi-aksi yang sudah dilakukan La Via Campesina ditingkat internasional, ribuan mobilisasi yang dilakukan ditingkat nasional, untuk menghempang bagaimana agar *World Trade Organization* itu tidak bisa eksis di dunia ini. Karena itu pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada petani, kepada nelayan, kepada buruh yang terlibat di berbagai perlawanan kita sejak inisiator tahun 1999 dan yang terbesar tahun 2005 di Hongkong dan tahun 2007 yang lalu di Jenewa.

Sejak tahun 2005, berkat perjuangan kita yang begitu kuat, *World Trade Organization* tidak berani lagi bersidang di luar kota Jenewa. Inilah merupakan salah satu hasil perjuangan kita. *World Trade Organization* sudah tidur sebenarnya. Tetapi kekuatan kapitalisme liberal, mereka tidak diam. Mereka sungguh panjang akalnya. Berbagai kesepakatan internasional melalui *Free Trade Agreement*, melalui *World Bank*, kesepakatan-kesepakatan yang dibawah *World Bank*, dibawah kesepakatan IMF, mereka jalankan kebijakan neoliberalisme itu. Indonesia merupakan negara yang menjadi korban pertama di dunia ini. Yaitu ketika Presiden Suharto menandatangani *Letter of Intent* tahun 1998. Kita adalah negara pertama yang mengalami krisis pangan tersebut, karena Indonesia lah yang pertama kali menandatangani *World Trade Organization* pada tahun 1995.

Jadi hari ini sama-sama kita ketahui, pemerintahan SBY sama buruknya dengan pemerintahan Soeharto, saudara-saudara sekalian. Kalau pemerintah Soeharto telah membawa kehancuran pangan Indonesia tahun 1998, maka pada tahun 2011 ini dia membuat kehancuran pertanian dan pangan yang kedua di Indonesia dengan membuka impor pangan yang sebesar-besarnya ke Indonesia ini.

Angka kelaparan di Indonesia hari ini telah meningkat dua kali lipat seketika karena melampaui harga makanan makanan yang sebenarnya bisa diproduksi oleh para petani yang ada di sini sebenarnya. Tetapi kata kebijakan neoliberalisme itu, mereka membuka impor kacang kedelai. Kita yang bisa memproduksi kedelai itu sekarang kita makan tempe, makan tahu, dan berbagai susu untuk bayi kita itu dari kacang kedelai yang diimpor dari Amerika, dari Brazil, dari Argentina. Bahayanya, itu bukan hanya impor yang menghabiskan devisa negara kita, tetapi itu adalah yang mengandung rekayasa genetika yang di Eropa tidak dibolehkan dimakan oleh manusia apalagi bayi, Di Eropa itu hanya makanan ternak, makanan hewan, untuk peternakan babi yang besar di Norwegia sana. Tapi inilah yang kita hadapi hari ini. Pemerintah Indonesia telah menghancurkan perdagangan dalam negeri kita, dan menurut kita, kalau kita tidak cegah, akan menghancurkan masa depan rakyat Indonesia, saudaraku-saudaraku sekalian. Hari ini kita penting berkumpul di tempat ini, untuk menyatakan tekad kita, bagaimana kita rakyat Indonesia ini bisa bersatu. Saya merasa senang sekali, hadir hari ini di sini, termasuk Mbak Endah yang sekarang di IGJ, dulu bekerja aktif di lembaga konsumen. Dengan kedatangan dia ini menyatakan perjuangan kita hari ini bersatu, kita bisa menggunakan instrumen hak asasi manusia, kita bisa menggunakan perjuangan dengan isu lingkungan hidup.

-Henry Saragih -

Deklarasi SPI Kediri: Perjuangan Merebut Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria Sejati

KEDIRI. Petani kecil dan buruh tani perwakilan dari tujuh kecamatan di Kabupaten Kediri (Kecamatan Plosoklaten, Badas, Plemahan, Kandangan, Pare, Gurah dan Kecamatan Brumbung) mendeklarasikan berdirinya Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Kediri, di Kecamatan Pare tepatnya gedung Balai Desa Tertek (06/02).

Di hadapan ratusan petani Kediri dan perwakilan DPC SPI Blitar dan Ponorogo, para deklarator menyampaikan begitu pentingnya kehadiran sebuah organisasi petani yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan kaum tani di Indonesia, khususnya petani di Kediri.

Ruslan, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa masalah petani Kediri ini juga menjadi masalah petani lain di Jawa Timur. Masalah-masalah seperti kepemilikan tanah, benih, pupuk, pasar dan lainnya sampai hari ini masih dirasakan petani.

"Bersama SPI, kita harus berjuang mengatasi masalah petani di Kediri," ungkap Ruslan.

Sementara itu Ali Fahmi perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan hal yang senada dengan apa yang disampaikan Ruslan.

Ali Fahmi menekankan bahwa Kediri adalah salah satu sentra terbesar penghasil bibit jagung di Indonesia. Tapi justru aneh dan menyakitkan, karena di Kediri jugalah terdapat sebuah kasus yang menyebabkan seorang petani dipenjara dengan tuduhan penjiplakan bibit jagung milik perusahaan.

"Penguasa bibit jagung tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang, dalam hal ini



(Atas) Pembacaan deklarasi Serikat Petani Indonesia (SPI) Cabang Kediri
(Bawah) Pentas seni rakyat berupa musik perjuangan, serta aksi teatrikal.

perusahaan besar asing. Petani hanya disuruh sebagai buruh produksi bibit. Sementara urusan lainnya semua dikuasai oleh perusahaan. Ini jelas-jelas penindasan dan parampasan hak petani atas bibit dan benihnya sendiri," ungkap Ali.

"Untuk itu kekuatan kita dalam sebuah wadah perjuangan di SPI menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya mewujudkan hak asasi petani

atas benih dan lainnya," tegas Ali," tegasnya.

Ali Fahmi juga menyatakan bahwa selama ini Kediri memang berperan sebagai sentra produksi benih jagung hibrida yang tentu hanya dikuasai oleh perusahaan besar. Di tahun 2011 ini, perusahaan besar tersebut akan memproduksi bibit jagung transgenik di kabupaten Mojokerto demi kepentingan ekspor walaupun jagung

transgenik ini tidak layak, terutama dari segi kesehatan dan lingkungan.

"Sebenarnya pemerintah harus melihat pengalaman kegagalan tentang penanaman kapas transgenik di Sulawesi pada awal 2000-an. Penanaman itu justru menimbulkan masalah besar bagi petani. Pemerintah seharusnya tidak memberikan izin kepada perusahaan tersebut, meski dalihnya hanya untuk pasar ekspor. SPI sudah dari awal menolak terhadap tanaman transgenik. Dengan dibentuknya DPC SPI Kediri, kita harus semakin gigih melawan perusahaan ini yang nyata-nyata telah menyengsarakan petani," tambah Ali.

Setelah deklarasi, acara dilanjutkan dengan Musyawarah Cabang (Muscab) I DPC SPI Kediri. Muscab memilih dan menetapkan program kerja, anggota Majelis Cabang Petani (MCP) SPI dan Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kediri. Syahrul Munir terpilih sebagai Ketua MPC SPI Kediri Nur Hadi Zaini sebagai Ketua BPC SPI Kediri periode 2011-2015.

Acara deklarasi dan Muscab yang mengambil tema "Meneguhkan Gerakan kaum Tani dalam Perjuangan Merebut Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria Sejati" ini juga dimeriahkan pagelaran music dan teatrikal.

Aksi teatrikal menggambarkan penindasan yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap petani kecil, yakni penguasaan benih dan bibit secara semena-mena oleh perusahaan besar yang telah merebut secara paksa terhadap kedaulatan petani atas benih dan bibit sendiri.#



Petani, Nelayan, Buruh dan Gerakan Masyarakat Sipil Lainnya Bersatu Dalam Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia



Para perwakilan gerakan masyarakat sipil Indonesia saat penandatanganan Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia di Taman Menteng, Jakarta Pusat (24/02/2011)

JAKARTA. Indonesia harus berdaulat atas pangannya. Berdaulat atas pangan berarti berdaulat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan berdaulat untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.

Hal inilah yang disepakati para pemimpin gerakan masyarakat sipil di Indonesia dalam acara "Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia" di Taman Menteng, Jakarta,

malam ini (24/01). Mereka adalah Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia-SPI dan La Via Campesina), Sutrisno Sastromiharjo (Serikat Buruh Indonesia-SBI), Budi Laksana (Serikat Nelayan Indonesia-SNI), Risma Umar (Solidaritas Perempuan-SP), Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia-API), Berry Nahdian Furqan (Wahana Lingkungan Hidup-Walhi), Chalid Muhammad (Institut Hijau Indonesia-IHI), Indah Sukmaningsih (*Institute of Global Justice-IGJ*),

Gunawan (*Indonesia Human Rights Committee on Social Justice-IHCS*), beserta elemen gerakan masyarakat sipil lainnya.

Henry Saragih dalam pidato politiknya menekankan bahwa sudah saatnya semua elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia ini untuk merebut kembali kedaulatan pangannya yang selama ini sudah "diberikan" pemerintah kepada korporasi dan pihak asing.

"Kebijakan impor bahan pangan yang semakin tak

terkendali, proyek *food estate*, perampasan tanah, kriminalisasi petani dan masyarakat adat adalah gambaran bahwa pemerintah saat ini memang sama sekali tidak berpihak kepada petani dan rakyat kecil, dan hanya mengutamakan kepentingan korporasi dan pihak asing" tegas Henry.

Petisi ini sendiri dibacakan oleh Martinus Sinani, perwakilan SPI yang juga Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Nusa Tenggara Timur.

Acara ini juga sekaligus syukuran terhadap penghargaan yang diberikan kepada Henry Saragih dari sebuah surat kabar Inggris ternama, *The Observer-Guardian*.

The Observer pada Januari 2011 yang lalu menobatkan Henry sebagai salah seorang dari 20 tokoh hijau dunia dan ditasbihkan sebagai pembela masyarakat miskin pedesaan.

Sebelumnya Henry Saragih juga dinobatkan menjadi 50 orang yang mampu menyelamatkan bumi oleh harian *The Guardian* Inggris pada 2008 lalu.

Berry Nahdian Furqan, Direktur Walhi menyebutkan bahwa penghargaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada Henry Saragih membuktikan kapasitas seorang Henry Saragih sebagai seorang pejuang yang konsisten memperjuangkan hak-hak kaum petani dan kaum miskin pedesaan.#

■ ■ ■



Untuk Merebut Kembali Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, silahkan klik dan tandatangani :

<http://www.petitiononline.com/daulat>

Henry Saragih: “Petisi Kedaulatan Pangan ini Bisa Menjadi Titik Awal Revolusi Indonesia”



Henry Saragih, Ketua Umum SPI dan Koordinator Umum La Via Campesina menyampaikan pidato politiknya dalam acara Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, di Taman Menteng, Jakarta Pusat (24/02/2011).

JAKARTA. Indonesia semakin tidak berdaulat atas pangan-pangan. Pemerintah Indonesia pun semakin tidak berdaya membendung kekuatan korporasi dan kepentingan asing yang semakin “menggila”, mencengkeramkan cakarnya ke dalam kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Rakyat lapar dan miskin semakin banyak. Krisis pangan pun semakin memburuk.

Setidaknya hal di atas yang menjadi salah satu pokok pikiran dari pidato politik Henry Saragih – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) – dalam acara Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, di Taman Menteng, Jakarta (24/02).

Henry menegaskan bahwa krisis harga pangan yang ter-

jadi sekarang ini, sebagai akibat dari diterapkannya sistem neoliberalisme. Melalui *World Trade Organizations* dan *Free Trade Agreement*. Akibatnya pertanian terkonsentrasi pada pertanian ekspor, dan monokultur. Dewasa ini makanan tidak lagi sejatinya untuk makanan manusia, tetapi makanan telah diutamakan sebagai bahan industri agrofuel, dan keperluan perusahaan peternakan. Makanan juga menjadi bahan spekulasi perdagangan.

Sementara itu, saat ini terus terjadi perampasan tanah-tanah rakyat dan penguasaan tanah-tanah negara oleh korporasi-korporasi besar. Hal ini membuat para petani dan masyarakat adat asli tergusur. Bukan hanya itu, pengusuran ini juga diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat.

Henry menekankan bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah salah arah dalam mengambil kebijakan pembangunan pertanian dan pangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah tidak sanggup lagi menjaga kedaulatan pangan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyerahkan kebijakan pangan Indonesia pada perangkap perdagangan bebas pangan dunia, ke tangan para spekulan pangan dunia, mendorong pemenuhan pangan Indonesia dari hasil impor.

“Pemerintah Indonesia telah membiarkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, tetapi sebaliknya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Semua ini menunjukkan bahwa pemer-

intah Indonesia telah abai terhadap konstitusi Indonesia, terutama pada pasal 33 UUD 1945, dan juga pasal 27 ayat 2, 31, dan 34,” tegasnya.

“Indonesia terus menerus menjalankan kebijakan salah arah ini. Melakukan liberalisasi pertanian dan pangan, menyerahkan perdagangannya kepada mekanisme pasar serta menempatkan dan mendahulukan kepentingan korporasi-korporasi agribisnis besar. Hal itu terbukti dimana pemerintah hanya memainkan instrumen pembebasan bea masuk serta mempercepat beroperasinya food estate dan mendorong pengembangan kawasan-kawasan food estate yang lain, untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional,” papar Henry.

SPI sebenarnya telah menyebutkan bahwa kedaulatan pangan merupakan jalan keluar krisis pangan. Pertanian berkelanjutan berbasis keluarga kecil telah terbukti mampu memberi makan masyarakat dunia. Dalam acara yang dihadiri oleh para pemimpin gerakan sosial di Indonesia ini, Henry menegaskan bahwa petisi ini bisa menjadi titik awal untuk revolusi kebijakan pangan di Indonesia yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Petisi ini akan kita sebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk kemudian diberikan kepada pemerintahan, mulai dari yang terkecil hingga pemerintahan pusat. Selain itu petisi ini tidak hanya berhenti sampai disitu, SPI bersama gerakan rakyat lainnya juga akan mengerahkan massa untuk menuntut pemerintah mempertahankan kedaulatan pangan rakyat Indonesia yang hingga saat ini sudah direnggut oleh korporasi dan kepentingan asing,” tegas Henry.#

SPI Kecam Penggusuran dan Pengrusakan Lahan Petani oleh PTPN II Sawit Seberang

LANGKAT. Intimidasi berupa pengrusakan lahan petani kembali terjadi. Lahan perjuangan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat dirusak oleh PTPN II Kebun Sawit Sebrang. Ratusan tanaman coklat, karet dan kelapa sawit dirusak serta posko-posko milik petani anggota SPI Basis Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang dibakar. (22/02)

Wagimin, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara mengutuk keras dan mengecam tindakan ini.

"Pihak perkebunan dalam kasus bersikap sangat arogan menanggapi permasalahan yang melibatkan petani kecil," tegas Wagimin.

Dia juga menegaskan bahwa Pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) sebagai aparaturnegara tidak mengambil peran aktif dalam menjaga situasi kondusif di lokasi sengketa maupun lingkungan tempat tinggal masyarakat bahkan cenderung berpihak kepada kaum pemodal.

Berdasarkan penuturan Saenan, petani anggota SPI Basis Sei Litur, sekitar pukul tujuh pagi, sepuluh truk yang berisikan karyawan dari PTPN II Kebun Sawit Sebrang- yang langsung dipimpin oleh Purnomo (Manajer PTPN II Kebun Sawit Sebrang), dibantu oleh aparat TNI AD - mendatangi lahan milik petani.

Dengan membawa anggota sepuluh orang menggunakan



Beberapa rangkaian foto yang menunjukkan pengrusakan dan penggusuran lahan petani Sei Litur oleh PTPN II yang dibantu TNI AD dan Kepolisian

pakaian preman, Salomon Ginting (Intel Kodim Kabupaten Langkat) dibantu oleh Suliwijaya (anggota Koramil Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat) serta pihak kepolisian membantu pihak PTPN II Kebun Sawit Sebrang yang merusak dan menyerobot masuk ke

lahan perjuangan milik anggota SPI Basis Sei Litur Tasik.

Tanpa melakukan komunikasi dengan petani, mereka langsung masuk dan merusak tanaman serta membakar posko milik petani. Sempat terjadi perlawanan oleh petani. Namun, jumlah massa yang tidak seimbang menyebabkan petani tidak dapat mempertahankan lahan mereka

Dalam peristiwa ini, seorang petani, Erli (46 tahun), mengalami tindak kekerasan oleh karyawan PTPN II Kebun Sawit Sebrang. Dia berusaha untuk mempertahankan tanaman yang ingin dirusak oleh pihak perkebunan.

"Ratusan tanaman milik petani sudah rusak dan tujuh gubuk kami dibakar. Ibu Erli langsung kami bawa ke Puskesmas Desa Sei Litur untuk diperiksa. Tapi Puskesmas menolak untuk menyerahkan hasil visum, dengan alasan pihak dari kepolisian yang akan mengambil hasil dari visum tersebut," ujar Saenan.

Saenan menjelaskan bahwa sejak tahun 1953, tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian mereka dengan menanam tanaman pangan yaitu padi.

Pada 1963, lahan diambil paksa oleh perusahaan perkebunan bernama Boenes Area yang dipimpin oleh Tuan Besar Chris Wehh, namun karena kegigihan masyarakat untuk mempertahankan lahan, akhirnya lahan tersebut dapat dikuasai kembali oleh masyarakat.

Ketenangan masyarakat

tidak berlangsung lama. Pada 1975 - 1976, Kepala Desa Sei Litur Tasik yang saat itu dipegang oleh Almarhum Kasbun meminta paksa surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat dengan alasan akan diperbaharui dan bagi yang tidak mau menyerahkan dianggap sebagai PKI. Tanpa sepengetahuan masyarakat, pada tahun 1977 - 1978 lahan masyarakat telah beralih kepada PTPN II. Dengan kekuatan militer, PTPN II kemudian mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik perusahaan.

Sejak Oktober 2009, masyarakat menghimpun kekuatan dan bergabung dalam keanggotaan SPI Basis Sei Litur dan berjuang untuk merebut tanah yang dikuasai oleh PTPN.

"Oleh karena itu, kami mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sumut agar tidak menerbitkan Sertifikat HGU berdasarkan SK kepala BPN RI no. 119/HGU/BPN RI/2009, karena terdapat silang sengketa diatas areal lahan tersebut," ungkap Wagimin.

Wagimin juga mengajak semua pihak terkait terutama Pemerintahan Kabupaten Langkat agar dapat bersama-sama menyelesaikan konflik ini secara adil dan damai.

"SPI juga mengharapkan kepada pihak kepolisian dan yang terkait untuk benar-benar mengusut tuntas dan menindak pihak yang telah melakukan kekerasan terhadap petani anggota SPI Basis Sei Litur," tegas Wagimin.#

TOLAK FOOD ESTATE !!



LEMBARAN KHUSUS

campesinos

KABAR INTERNASIONAL

PEMBARUAN TANI
EDISI 85
MARET 2011

7

La Via Campesina Memimpin Perhelatan WSF 2011



Delegasi La Via Campesina dalam aksi pembukaan Forum Sosial Dunia yang diselenggarakan di Dakar, Senegal pada 6-11 Februari 2011 yang lalu.

DAKAR. *World Social Forum* (WSF) 2011 yang digelar pada 6-11 Februari 2011 yang lalu di Dakar, Senegal merupakan ajang berkumpulnya gerakan sosial dari seluruh penjuru dunia dan dari berbagai macam bidang, baik itu pertanian, buruh, nelayan, masyarakat miskin kota, dan lain sebagainya. WSF2011 dipusatkan di universitas terbesar di kota Dakar, Universitas Cheikh Anta Diop.

La Via Campesina memimpin dalam perhelatan akbar ini. Hal ini bisa terlihat dari setiap majelis dan diskusi yang diselenggarakan La Via Campesina di forum-forum WSF.

Pierre, delegasi La Via Campesina asal Perancis yang aktif dalam majelis dan diskusi perbenihan mengungkapkan bahwa buah pemikiran dan ide-ide perjuangan La Via Campesina mendominasi dalam setiap forum.

"Baik itu yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun organisasi masyarakat sangat menghargai ide-ide perjuangan yang diperjuangkan La Via Campesina. Khusus untuk masalah perbenihan ini kami banyak membahas permasalahan benih transgenik, serta GMO oleh perusahaan seperti Monsanto," ungkap Pierre

Jose, seorang petani jagung asal Mozambik yang aktif mengikuti majelis dan diskusi

perubahan iklim mengungkapkan bahwa inisiatif La Via Campesina pada Konferensi Cochabamba di Bolivia tahun lalu cukup membawa angin segar dan menginisiatif solusi alternatif perubahan iklim.

Agus Ruli, delegasi La Via Campesina asal Indonesia yang aktif dalam majelis dan forum tentang perampasan tanah mengungkapkan bahwa La Via Campesina memimpin inisiatif melawan perampasan lahan yang selama ini terjadi di berbagai penjuru dunia.

Kepemimpinan La Via Campesina juga ditunjukkan dengan dipilihnya Fatimatou, delegasi La Via Campesina asal Mali yang membacakan Deklarasi Dakar tentang Perampasan Tanah. Begitu juga Josie, delegasi asal Perancis yang terpilih sebagai salah seorang deklarator dalam Majelis Gerakan Sosial.

"Selain itu kita (La Via Campesina) juga memimpin dalam forum kedaulatan pangan, perdagangan bebas, sampai perjuangan perempuan," ungkap Agus Ruli.

"Semoga La Via Campesina semakin mampu mengglobalkan harapan dan mengglobalkan perjuangan kita semua," ungkap Josie.



Deklarasi Dakar Tentang Perampasan Tanah



Fatimatou, delegasi La Via Campesina yang membacakan Deklarasi Dakar Tentang Perampasan Tanah

DAKAR. Forum Sosial Dunia yang digelar di Dakar, Senegal (6-11 Februari 2011) meninggalkan beberapa harapan untuk masa depan yang lebih baik. La Via Campesina mengawal perhelatan akbar ini dan berpartisipasi sangat aktif memberikan kontribusi positif.

Beberapa keluaran dari forum ini adalah deklarasi-deklarasi mengenai masa depan dunia, seperti deklarasi perubahan iklim, perdagangan bebas, perbenihan, hingga perampasan lahan. Berikut ini adalah Deklarasi Dakar Tentang Perampasan Lahan yang dibacakan oleh Fatimatou, perwakilan La Via Campesina:

Kami, organisasi petani, organisasi non-pemerintah, organisasi keagamaan, serikat pekerja dan gerakan sosial lainnya, berkumpul di Dakar untuk Forum Sosial Dunia 2011:

Menimbang bahwa pertanian kecil dan berbasis keluarga, yang mewakili sebagian besar petani di dunia, merupa-

kan jenis pertanian yang paling tepat untuk:

- Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta menjamin keamanan pangan dan kedaulatan negara,
- Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan dan memelihara kehidupan ekonomi di daerah pedesaan, kunci utama untuk pengembangan wilayah yang seimbang,
- Berproduksi dengan menghormati kesinambungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang;

Menimbang bahwa perampasan tanah besar-besaran baru-baru ini menargetkan puluhan juta hektar untuk kepentingan kepentingan pribadi atau negara ketiga - baik untuk alasan makanan, energi, pertambangan, lingkungan, pariwisata, spekulasi atau geopolitik - Hal ini melanggar hak asasi manusia dengan mencabut hak penduduk lokal, masyarakat

adat, petani, penggembala dan masyarakat nelayan dengan memusnahkan mata pencaharian mereka; dan atau dengan membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam atau dengan menghapus kebebasan mereka untuk menghasilkan yang mereka inginkan, dan memperburuk ketidaksetaraan perempuan dalam akses dan kontrol atas tanah;

Menimbang bahwa investor dan pemerintah juga terlibat langsung dalam mengancam hak atas pangan bagi populasi pedesaan, bahwa merekalah yang menyebabkan gangguan merajalela dan eksodus masyarakat desa ke kota, bahwa mereka memperburuk kemiskinan dan konflik dan memberikan kontribusi pada hilangnya pengetahuan pertanian dan keterampilan dan identitas budaya;

Menimbang pula bahwa tanah dan penghormatan hak asasi manusia adalah pertama di bawah yurisdiksi parlemen nasional dan pemerintah, dan mereka menanggung bagian terbesar dari tanggung jawab atas perampasan tanah;

Maka dengan ini kami menghimbau parlemen dan pemerintah nasional untuk segera menghentikan semua perampasan tanah besar-besaran saat ini atau di masa mendatang dan mengembalikan tanah yang dirampas. Kita harus mendesak pemerintah untuk menghentikan penindasan dan pengkriminalisasian gerakan perjuangan untuk tanah dan untuk melepaskan aktivis yang ditahan. Kami mendesak bahwa pemerintah nasional menerapkan kerangka kerja yang efektif

untuk pengakuan dan pengaturan hak atas tanah untuk penggunaannya melalui konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu korupsi dan sejenisnya harus dihilangkan, yang membatalkan setiap usaha pengelolaan tanah bersama.

Kami menuntut pemerintah, Lembaga Perwakilan Daerah, FAO dan lembaga-lembaga nasional dan internasional lainnya untuk segera melaksanakan komitmen yang dibuat pada Konferensi Internasional tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD) tahun 2006, yaitu mengamankan hak atas pengguna tanah, kebangkitan proses reforma agraria berdasarkan akses yang adil terhadap sumber daya alam dan pembangunan pedesaan untuk kesejahteraan semua.

Kami meminta proses elaborasi dari Pedoman FAO atas Tata Tanah dan Sumber Daya Alam diperkuat, dan bahwa mereka didasarkan pada Hak Asasi Manusia seperti yang didefinisikan dalam berbagai piagam dan pembatasan. Hak-hak ini hanya akan efektif jika perangkat hukum yang mengikat diimplementasikan di tingkat nasional dan internasional untuk memaksakan kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban mereka. Selain itu, setiap negara harus bertanggung jawab atas dampak kebijakan atau kegiatan perusahaan-perusahaan di negara-negara yang ditargetkan untuk penanaman investasi. Demikian pula, kita harus menegaskan kembali supremasi

Bersambung ke Halaman 10

TOLAK

REDD+
Partnership

Galeri Foto Aksi La Via Campesina di WSF2011



KIRI-KANAN: (Empat foto teratas): Aksi La Via Campesina pada pembukaan WSF2011 di ibukota Dakar, Senegal. (Kiri Bawah): Ibrahim Coulibaly, salah satu pimpinan La Via Campesina regional Afrika. (Kedua dari Kiri Bawah): Evo Morales, Presiden Bolivia yang hadir dalam pembukaan WSF2011 di Dakar Senegal. (Ketiga dari Kiri Bawah): Agus Ruli Ardiansyah, perwakilan SPI yang hadir dalam aksi La Via Campesina pada WSF2011. (Kanan Bawah): Seorang peserta aksi La Via Campesina bandana bertuliskan *Food Sovereignty* (Kedaulatan Pangan).

Peluncuran Kampanye La Via Campesina, Menentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Sambungan halaman 8, *Deklarasi...*

Hak Asasi Manusia atas perdagangan internasional dan rezim keuangan, yang merupakan sumber spekulasi pada sumber daya alam dan barang-barang pertanian.

Sementara itu, kami mendesak Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) untuk secara definitif menolak prinsip-prinsip Bank Dunia atas "investasi pertanian yang bertanggung jawab" (RAI), yang tidak sah dan tidak memadai untuk mengatasi fenomena tersebut, dan untuk memasukkan komitmen dari ICARRD serta kesimpulan dari Penilaian Internasional Pertanian Pengetahuan, Sains dan Teknologi untuk Pembangunan (IAASTD) dalam Global Kerangka Kerja Aksi ini.

Kami mendesak negara-negara, organisasi regional dan lembaga-lembaga internasional untuk menjamin hak masyarakat atas tanah dan mendukung pertanian keluarga dan agro-ekologi. Kebijakan pertanian yang tepat harus mempertimbangkan semua jenis produsen yang berbeda (masyarakat adat, penggembala, nelayan rakyat, petani, penerima manfaat reforma agraria) dan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan pemuda.

Akhirnya, kami mengundang orang-orang dan organisasi-organisasi masyarakat sipil di mana pun untuk mendukung - baik itu melalui media massa, perorangan, hukum, keuangan atau budaya populer - semua orang yang melawan perampasan tanah dan untuk menekan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap hak-hak masyarakat.

Kita semua memiliki tugas untuk menolak dan mendukung orang-orang yang berjuang untuk martabat mereka!



Kampanye La Via Campesina melawan kekerasan terhadap perempuan

DAKAR. Forum Sosial Dunia 2011 yang diselenggarakan di Dakar (6-11 Februari 2011), Organisasi petani anggota La Via Campesina asal Afrika, mulai mengkampanyekan gerakan menentang kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini secara resmi sebenarnya telah diluncurkan untuk skala internasional pada konferensi kelima La Via Campesina, di Maputo, Mozambik, di tahun 2008.

Di semua masyarakat, perempuan selalu menjadi korban diskriminasi ekonomi, kekerasan fisik, seksual dan psikologis, baik dalam bidang publik dan swasta. Kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan segala bentuk kekerasan yang terlalu vulgar untuk ditulis disini mayoritas penderitanya adalah perempuan. Selanjut-

nya, 70% masyarakat dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan juga penyebabnya, untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi. Memperkuat dalam aliansi dan kemitraan dengan organisasi-organisasi nasional, regional dan internasional yang memerangi kekerasan dan menghormati hak-hak perempuan, seperti organisasi *World Women's March*. Menjamin partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan visibilitas mereka di kegiatan publik, dan mendorong terciptanya kawasan khusus perempuan.

Petani perempuan, seperti organisasi *World Women's March*. Menjamin partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan visibilitas mereka di kegiatan publik, dan mendorong terciptanya kawasan khusus perempuan.

"Kekerasan terhadap perempuan, apakah itu terjadi di lahan atau tempat kerja, dalam organisasi, di rumah atau di masyarakat juga merupakan urusan organisasi petani," ungkap seorang delegasi perempuan La Via Campesina asal Mali

Melanie menyatakan, untuk mengakhiri kekerasan ini, setiap pihak harus memahami penyebabnya, dan secara kolektif, baik itu laki-laki dan perempuan berjuang menentangnya, berusaha menciptakan masyarakat baru yang mengakui hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan.

"Hak untuk hidup dan tumbuh dalam keselamatan, damai dan bermartabat, serta hak untuk bekerja dan berpendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Jika itu terancam, maka tugas kita untuk menentang dan menolaknya. Mari kita mengglobalisasikan perjuangan ini dan mengglobalkan harapan," tambah Melanie#

mutuskan, untuk memobilisasi melawan ketidakadilan ini.

"Kita tidak bisa tinggal diam!. Dengan memobilisasi berarti kita membantu untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan berusaha membangun masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan." ungkap Melanie, petani La Via Campesina asal Kongo.

Untuk tujuan ini, La Via Campesina, akan terus melakukan kegiatan baik dalam level regional ataupun internasional. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memulai atau mengambil bagian dalam kampanye nasional untuk meluluskan Undang-Undang yang menjamin hak-hak perempuan dan menolak kekebalan hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Mengorganisir tindakan publik yang mengutuk



Globalize Hope !!! Globalize Struggle !!!

www.viacampesina.org

SPI Meminta Asuransi Pertanian Dipersiapkan Matang



Lahan pertanian cabe di Yogyakarta yang rusak akibat erupsi Gunung Merapi

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah untuk melakukan persiapan yang matang sebelum mengimplementasikan asuransi pertanian.

"Asuransi pertanian yang akan dilaksanakan pemerintah dalam konteks melindungi petani pada dasarnya baik. Hanya saja, mekanismenya harus dipersiapkan dengan sangat matang dan komprehensif," kata Henry Saragih, Ketua Umum DPP SPI di Jakarta.

Jika tidak komprehensif, asuransi pertanian yang akan diatur dalam UU perlindungan Petani itu menurutnya hanya akan menjadi tempat korupsi baru.

Dan hanya sebagai politik pencitraan bagi pemerintah atau hanya menguntungkan perusahaan asuransi asing. "Karena itu kami juga meminta agar lembaga yang mengelola asuransi pertanian itu adalah

badan-badan usaha milik daerah (BUMD) atau BUMN, bukan lembaga atau perusahaan asuransi asing," tegasnya.

Seperti diketahui, pada akhir tahun lalu Menteri Pertanian Suswono menyatakan bahwa kementeriannya sedang menyiapkan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat cuaca ekstrem. Namun Suswono belum bersedia mengungkapkan berapa besaran asuransi dan mekanisme detilnya dengan alasan pelaksanaannya masih menunggu pembahasan RUU Perlindungan Petani.

Menurut Henry, implementasi asuransi tersebut tidak boleh memberatkan petani sama sekali, apalagi dengan menerapkan premi secara langsung kepada petani. "Kalau konsepnya belum lengkap, lebih baik pelaksanaannya ditunda dulu, atau jangan dinamakan asuransi, tapi bantuan pertanian saja," imbuhnya.

Ketua DPW SPI Jawa Timur Ruslan, juga mengatakan program asuransi pertanian tidak akan membantu jika petani tetap dikenakan beban premi. "Kalau petani dikenakan premi mendingan tidak usah, yang untung hanya yang di atas, sedangkan petani, sudah rugi karena panen gagal malah makin tepuruk menanggung premi," ujarnya.

Namun Ruslan mengakui bahwa program asuransi pertanian akan sangat membantu petani jika dilaksanakan dengan konsep yang matang tanpa membebankan petani sama sekali. Iklim ekstrim yang sering terjadi dewasa ini menurutnya sangat memukul para petani di daerah itu karena banyak yang mengalami gagal panen.

Lebih dari 400 hektar lahan persawahan di Ponorogo, salah satu daerah sentra beras di Jawa Timur, dipastikannya gagal panen setelah diterjang banjir beberapa waktu lalu. Apalagi dia meyakini lahan pertanian di Jawa Timur semakin berkurang setiap tahunnya, seperti lahan tani di Kelurahan Purbosuman yang pada tahun lalu sudah beralih fungsi menjadi lahan pabrik dan perumahan.

Libatkan Organisasi Tani

Salah satu jalan agar konsep asuransi pertanian itu bisa lebih matang, Henry mengusulkan pemerintah mengajak pemda dan organisasi-organisasi petani untuk ikut serta merumuskan konsep serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan begitu, konsep asuransi terse-

but dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pertanian di masing-masing daerah dan para petani sendiri.

Selain itu, keterlibatan pemda dan organisasi petani ini juga diyakininya dapat membuat konsepnya lebih komprehensif, seperti asuransi pertanian yang telah dirumuskan di Kabupaten Jembrana, Bali. Henry menilai rencana konsep asuransi pertanian Jembrana dapat menjadi model yang cukup ideal dimana untuk sekali gagal panen (puso) petani mendapat klaim sebesar Rp2,5 juta per hektar, sedangkan preminya ditanggung oleh pemda.

Lebih jauh, Henry mengatakan, disamping asuransi pertanian, pemerintah juga hendaknya sesegera mungkin melakukan program sosialisasi iklim ekstrim kepada petani untuk menghindari dampak yang lebih besar. Perlu dibuat program yang sistematis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim ini dan melakukan sosialisasi yang luas dan efektif kepada para petani agar dapat dapat menekan dampaknya lebih maksimal, jelasnya.

SPI juga, lanjutnya, sampai sekarang masih menagih pemerintah agar segera merealisasikan janji-janjinya untuk merealisasikan kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan pertanian berkelanjutan 'Go Organic'. Kedua kebijakan itu belum berjalan secara masif sejauh ini, padahal pertanian berkelanjutan mampu menangkal dan dapat meminimalisir dampak iklim ekstrim. #



Klik www.spi.or.id
Untuk Mendapatkan
Tabloid Pembaruan Tani Versi Elektronik

SPI Yogyakarta Kembangkan Demplot di Lereng Merapi



Demplot tumpang sari di lereng Gunung Merapi yang dikelola oleh SPI Yogyakarta

YOGYAKARTA. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta mengembangkan demplot Tumpang Sari seluas 300 meter di Kampung Sidorejo Padukukan Pangukrejo, Desa Umbulharjo Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Februari 2011).

Demplot ini muncul karena adanya statement dari salah satu institusi yang mengatakan bahwa tanah ataupun lahan yang terkena erupsi dan awan panas di sekitar lereng merapi tidak bisa ditanami selama delapan tahun ke depan. Namun pada kenyataan daerah-daerah yang terkena erupsi dan lahar panas di lereng-lereng aliran lahar sudah mulai ditumbuhi rumput ilalang, serta umbi-umbian. Lujianto, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta menyatakan bahwa SPI bekerjasama dengan berbagai elemen untuk membuktikan bahwa tanah yang terkena erupsi serta awan panas itu bisa ditanam. Untuk membuktikan hal tersebut, SPI bersama Banser Pakem, FTP UGM, FSUB-SOBAT dan warga sekitar lereng Merapi mencoba untuk menanam tanaman pangan dengan konsep agroforestri (menanam pepohonan di

lahan pertanian).

"Intinya, warga menunggu pohon yang ditamani tanaman tahunan itu untuk tumbuh dan berbuah, kemudian ditanami tanaman pangan di sekitar lahan tersebut," ujar Lujianto.

Lujianto menjelaskan bahwa pada waktu erupsi, kedalaman debu dan pasir di kampung ini mencapai 10 cm. Demplot tumpang sari yang dikembangkan adalah tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau. Demplot ini diharapkan sebagai langkah awal untuk pengembangan pertanian dengan konsep agroforestri di lereng Merapi. Untuk melengkapi konsep agroforestri ini juga akan dikembangkan peternakan dimana nantinya dari hasil ternak ini bisa digunakan untuk pupuk organik.

"Hal ini juga sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan SPI, untuk menuju kedaulatan pangan masyarakat Yogyakarta," jelas Lujianto.

"Kedepannya, SPI Yogyakarta akan bekerjasama dengan Forum Pesantren Lereng Merapi (FPLM) untuk mengembangkan demplot ini di daerah-daerah lain, sekitar lereng merapi," tambahnya.#

Selamat Jalan, Pak Firli...



OGAN ILIR. Ahmad Firli menghembuskan nafas terakhirnya di usia 59 tahun, Senin, 31 Januari 2011, sekitar pukul 9 pagi. Pagi harinya ketika di lahan menyiapkan bibit nenas, beliau merasakan bibit sakit diperutnya. Setelah di rumah daerah Desa Talang Tengah Darat, Lubuk Keliat Ogan Ilir, tidak lama berselang setelah bersih-bersih badan kemudian wafat dengan tenang. Almarhum meninggalkan seorang Istri bernama Sundari dan enam orang anaknya. Ahmad Firli dilahirkan di Desa Kasih Raja 6 Oktober 1952.

Dua puluh tahun lebih Ahmad Firli berjuang bersama kaum tani. Beliau yang sebelumnya adalah seorang guru, meninggalkan gedung sekolah demi perjuangan yang lebih luas lagi. Perjalanan panjang di pelosok Sumatera Selatan, Sumatera Barat dilakoni. Tugas pengorganisasian petani-petani korban ketidakadilan diemban tanpa banyak mengeluh dan penuh tanggung jawab. Di masa orde baru, harus bergerilya mendidik kaum tani. Kemudian bergabung dan aktif di Sekretariat Bina Desa (SBD), pada tahun 1998 di bulan Agustus bersama JJ. Polong (Majelis Nasional Petani-MNP SPI), Muhammad Yamin, Syaiful Anwar dan kawan-kawan

lainnya mendeklarasikan Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS), yang dihadiri Ketua Umum FSPI Henry Saragih.

"Perjuangan petani itu jalan panjang yang sepi, butuh kesabaran dan dedikasi tinggi untuk memenangkan konflik agraria", Ujar Almarhum saat menjadi Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye SPSS. Tahun-tahun terakhir beliau aktif di Aliansi Petani Indonesia (API).

Namun melampaui sekat-sekat organisasi dalam perjuangan agraria, beliau juga mendorong agar Rengas Ogan Ilir berhimpun dalam Serikat petani Indonesia (SPI).

Dalam pertemuan terakhir, Januari 2011 dengan pengurus DPW dan DPP SPI di Palembang, merencanakan deklarasi SPI di Ogan Ilir. Namun ajal berkata lain, beliau telah memenangkan perjuangan ini.

"Aku berada di rumah duka, antara gerimis tangis dan doa. Pejuang itu memenuhi janjinya ketika mengumpulkan bibit nenas untuk tanah reklamasi, wajahnya yang beku mengukir pesan, "jalan agraria terus diperjuangkan", Ujar Polong.

Rohman Ketua Umum SPI Sumsel, menyampaikan Alm. Ahmad Firli, dikebumikan di Desa Kasih Raja, Lubuk Keliat, Ogan Ilir Sumatera Selatan.

"Satu lagi sahabat, kawan seperjuangan mendahului kita, dengan pesan yang tegas bahwa perjuangan kaum tani terus digelorakan," ungkap Rohman.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mendoakan beliau agar diterima di sisi Allah Yang Maha Kuasa.

"Keluarga besar SPI sangat kehilangan atas kepergian salah satu kader petani terbaiknya ini," ungkap Henry dengan khidmat.#

Masyarakat Banten Tolak Kehadiran Aqua Danone



Achmad Ya'kub (SPI) berorasi menolak kehadiran Aqua-Danone di Banten.

JAKARTA. Puluhan perwakilan masyarakat Padarincang, Banten bersama perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI), Walhi Nasional, LBH Jakarta dan Kruha mendatangi Kedutaan Besar Perancis di Jakarta untuk menolak keberadaan PT. Tirta Investama (Aqua Danone) (17/02). Perusahaan tersebut sangat meresahkan petani dan masyarakat. Lebih dari 9.000 rumah tangga tani di Padarincang belum lagi di ciomas terancam oleh kencangnya bisnis air.

Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI), Achmad Ya'kub dalam orasinya di depan kedubes prancis menyatakan bahwa keberadaan Aqua Danone untuk eksploitasi sumber air di Padarincang akan mengancam kekeringan atas 6.200 ha sawah produktif disana.

"Jika hal ini terjadi berarti pasokan pangan di Banten akan berkurang 24.800 ton Gabah Kering Panen (GKP) bila satu hektarnya rata-rata 4 ton satu kali panen. Bayangkan bila setahun dua kali panen, akan kehilangan potensi pangan sebanyak 49.600 ton GKP," ungkap Ya'kub.

Tidak hanya itu, selain an-

caman kerusakan lingkungan dan kekeringan masalah sosial akan marak, seperti pengangguran dan kemiskinan akibat lahan pertanian yang rusak.

Danone merupakan salah satu perusahaan MNC dari perancis, yang menguasai 80% penjualan Air minum dalam kemasan di Indonesia. Dua perusahaan besar air lainnya yang telah merampas kedaulatan petani dalam mengakses air di Banten diantaranya adalah Coca-cola dan Sosro. Kedua perusahaan ini telah mengambil permukaan air di wilayah Pandeglang. Selain itu, *Thames Water UK* (Inggris) dan *Suez-Lyonnaise* (France) juga telah menguasai PDAM di Jakarta.

Wakil warga Padarincang, Ovi dan Hatib, dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Aqua Danone telah menyebabkan masalah sosial dan lingkungan. Pembangunan pabrik air Aqua Danone telah 'merampas' 100 hektar sawah yang subur untuk kemudian dikonversi menjadi sumur arthesis penghasil air.

Danone berdalih tidak akan mengambil air permukaan, tetapi lebih parahnya Danone akan mengambil air bawah tanah dengan pengeboran sedalam 800 m.

"Parahnya lagi, mereka

sepertinya menyepelkan pemerintah. Karena per september 2008 operasi lapangan danone telah dihentikan, namun kenapa sekarang mulai lagi. Inilah yang menyebabkan kami mendatangi komnas HAM, kedutaan Perancis untuk mengusir Danone di kampung kami, kalau perlu di Indonesia ini," tegas Hatib.

Sebelumnya pada Desember 2010 lalu, sepuluh ribu lebih masyarakat protes keras di lokasi yang mengakibatkan penangkapan terhadap warga walau kemudian dilepaskan kembali atas desakan masyarakat.

Aktivis Walhi, Memet, menyatakan bahwa keberadaan Aqua Danone di Indonesia harus ditinjau kembali, karena merugikan secara lingkungan dan ekonomis bagi masyarakat Indonesia.

Pada aksi protes yang dikawal ketat oleh kepolisian ini, wakil masyarakat ditemui kuasa ekonomi sekaligus Wakil Duta Besar Perancis untuk RI Sebastian Surun. Hatib yang mewakili masyarakat memberikan data-data atas kelakuan Aqua Danone yang telah merusak dan merugikan masyarakat.

"Sampai kapanpun tidak ada tawar menawar, kami ingin Aqua Danone keluar dari lahan-lahan kami," teriaknya.

Rencananya pada tanggal 20 februari 2011, warga akan menggelar istighasah dilokasi agar aqua danone secepatnya

pergi.

Menurut catatan SPI terkait Kebijakan Sumber air ini, pada 19 Februari 2004, DPR telah mengesahkan UU Sumberdaya Air No. 7/2004. Dalam Undang-undang yang baru ini beberapa pasal memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu.

Melalui privatisasi ini, maka jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat banyak tersebut akhirnya ditentukan oleh swasta dengan mekanisme pasar (siapa ingin membeli / siapa ingin menjual).

Untuk itu pada tahun 2004 juga SPI, KruHA, Walhi dan kalangan ormas lainnya mengajukan UU nomer 7/2004 tentang SDA tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk di-Judicial Review.

Hak terhadap air yang setara merupakan hak asasi setiap manusia. UUD 1945 pasal 33 ayat 2 menjamin hak dasar tersebut. Pasal 33 ayat 2 tersebut menyatakan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kalimat tersebut mengandung makna tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang terjangkau setiap individu warga negara.#



Para pengunjuk rasa yang terdiri atas organisasi masyarakat sipil beserta warga asli Padarincang-Banten melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta (17/02), menolak kehadiran Aqua Danone yang telah mengeruk habis air di daerah mereka

SPI berpartisipasi dalam WSF 2011 di Dakar, Senegal



Perwakilan SPI di World Social Forum 2011 di Dakar, Senegal (6-11 Februari 2011)

DAKAR. Serikat Petani Indonesia (SPI) bergabung dalam perhelatan akbar, *World Social Forum* (Forum Sosial Dunia) di Dakar, Senegal (6-11 Februari 2011) bersama lebih dari 70 orang perwakilan petani dari Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia yang tergabung dalam La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional).

World Social Forum (WSF) merupakan forum terbuka yang mengumpulkan para penggerak gerakan rakyat dan organisasi masyarakat sipil dari seantero dunia. Dalam WSF 2011 ini, La Via Campesina memperjuangkan kedaulatan pangan sebagai solusi atas krisis pangan dan iklim dunia yang saat ini semakin memprihatinkan.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI menyatakan bahwa kedaulatan pangan dan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga kecil adalah solusi pasti atas krisis pangan dan iklim dunia saat ini. Selanjutnya, Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina ini menyampaikan bahwa dalam WSF 2011 La Via Campesina akan meluncurkan kampanyenya mengenai penghentian perampasan tanah begitu juga

kekerasan terhadap kaum Perempuan di Afrika.

"La Via Campesina bersama aliansi masyarakat sipil lainnya akan menggelar forum khusus untuk membahas perampasan tanah dalam konteks krisis pangan dan iklim dunia, yang semakin menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah peraturan ataupun undang-undang khusus tentang tanah/lahan yang mampu melindungi produksi petani bagi pasar lokalnya," ungkap Henry.

Agus Ruli Ardiansyah, perwakilan SPI yang menghadiri WSF 2011 mengungkapkan bahwa dia bersama petani La Via Campesina lainnya akan menggemakan kedaulatan pangan di forum ini.

"Kedaulatan pangan di setiap negara adalah harga mati bagi dan solusi untuk krisis pangan dan iklim saat ini," ungkap Ruli yang juga Ketua Departemen Polhukam SPI ini.

Ruli juga menyampaikan bahwa dalam WSF 2011 ini La Via Campesina juga menggelar forum dan diskusi lainnya seperti forum tentang kedaulatan benih petani melawan GMOs dan TNCs hingga persiapan COP 17 di Durban, Afrika Selatan (Desember 2011).#

SPI Selenggarakan Munas, Pleno dan Rakernas



Munas III, rapat pleno V, dan Rakernas IV SPI di Cibubur (23-27 Februari 2011)

CIBUBUR. Dewan Pelaksana Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) melaksanakan tiga perhelatan akbar sekaligus, yakni musyawarah nasional (Munas), rapat pleno dan rapat kerja nasional (Rakernas) di Bumi Perumahan Pramuka, Cibubur, Jawa Barat.

Acara yang berlangsung dari tanggal 23-27 Februari ini dimulai dengan rapat pleno Badan Pelaksana Pusat (BPP) dan Majelis Nasional Petani (MNP) SPI.

Rapat pleno SPI ini dibuka dengan pemaparan Ketua Umum SPI, Henry Saragih, tentang situasi politik dan ekonomi Indonesia dan dampaknya terhadap perjuangan petani.

"Pemerintahan saat ini cenderung berpihak kepada kepentingan kaum pemodal daripada kepentingan kaum kecil (baca: petani). Oleh karena itu SPI harus selalu tampil di depan untuk memperjuangkan kepentingan kita ini," ungkap Henry.

Setelah pleno, dilanjutkan dengan Munas SPI. Munas kali ini membahas mengenai masa depan gerakan politik di Indonesia yang harus

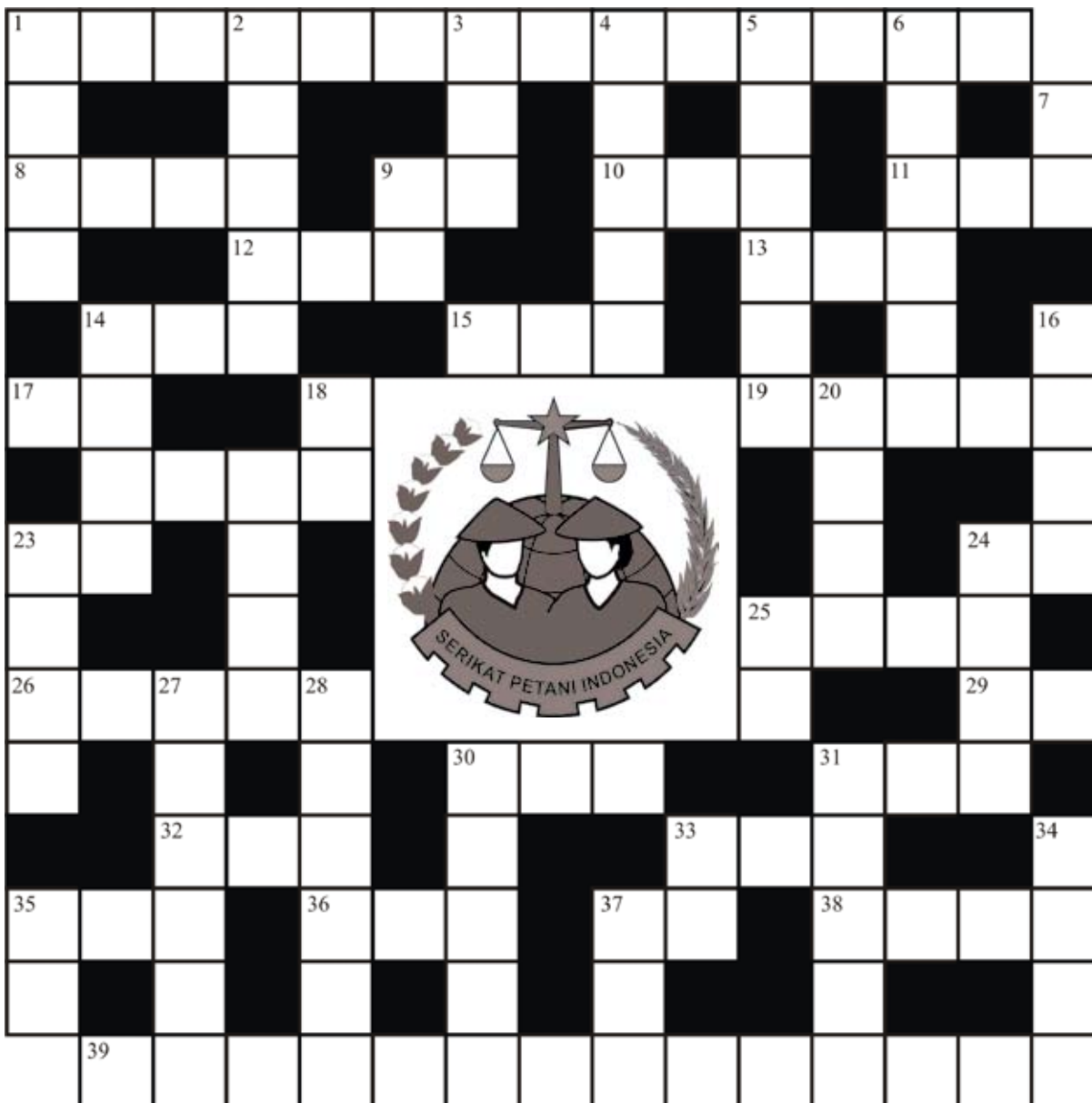
benar-benar memperjuangkan kepentingan kaum tani. Selain BPP dan MNP, Munas ini juga dihadiri oleh para Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) dari setiap provinsi di Indonesia yang telah menjadi anggota SPI.

Setelah Rapat Pleno dan Munas, kemudian diikuti dengan Rakernas yang mengagendakan pembahasan program kerja SPI untuk selama setahun ke depan.

Ali Fahmi, selaku Ketua Departemen Penguatan, Pengawasan dan Konsolidasi Organisasi Nasional SPI menyampaikan bahwa agenda utama Rakernas ini adalah penyampaian laporan perkembangan wilayah oleh para Ketua DPW serta pembahasan program kerja 2011 yang sebelumnya telah disahkan pada rapat pleno.

"Rakernas ini juga mensosialisasikan program kerja nasional 2011 SPI ke wilayah-wilayah sehingga terdapat kesamaan pandangan dan paradigma mengenai perjuangan SPI selama setahun ke depan" ungkap Ali.#

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 003



MENDATAR

1. Gerakan Petani Internasional 8. Sejenis pupuk 9. Nada kedua 10. Organisasi Buruh Internasional
11. Jenis bahan bakar 12. Panggilan untuk pria yang lebih tua (Jawa) 13. Lubang besar di kaki gunung
14. Sebelum 15. Pelumas 17. Tanda nomor kendaraan daerah Sumatera Barat 19. Roh
21. Panganan dari gandum berjualan barang 23. Awalan yang berarti satu 24. Orang yang dibicarakan
25. Sedap, lezat 26. Beberapa pulau (bintang) yang berkelompok menjadi satu 29. Angkatan Laut
30. Keluar masuknya uang 31. Mata uang terkecil 32. alat untuk memperlambat atau untuk
menghentikan gerakan atau putaran 33. Majelis Nasional Petani 35. Permohonan kepada Tuhan
36. Bagian isi buku 37. Cantik (Jawa) 38. Mega 39. Paham yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi
diatas segala-galanya

MENURUN

1. Perairan luas 2. Melodi 3. Ukuran luas 4. Ragam sastra 5. Semboyan 6. Organisasi di suatu wilayah
yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat 7. Air didinginkan 9. Rumah sakit
14. Sejenis sayuran 16. Pemimpin kerajaan 18. Diulang, pasangan paman 20. Mata uang Cina
22. Tumbuhan bahan dasar gula 23. Makanan pokok 24. Hewan laut 25. Bekas (Inggris) 27. Sejenis
ikan 28. Makanan penyedap dari cabai 30. Daging cincang panggang yang diberi sayuran 31. Paragraf
33. Kata ganti kepunyaan 34. Diulang, sejenis kue 35. Awalan 37. Regu penyelamat

Ketentuan Menjawab:

Tulis lengkap nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon yang bisa dihubungi serta asal basis SPI (jika ada). Tulis jawaban di selembar kartu pos. Jangan lupa untuk mencantumkan kupon TTS Pembaruan Tani 003 di sudut kanan atas kartu pos, lalu kirimkan ke alamat redaksi **Pembaruan Tani** (Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan, 12790 Indonesia). Jawaban juga bisa dikirimkan ke email redaksi di pembaruantani@spi.or.id dengan subyek: TTS **Pembaruan Tani** 003. Jawaban diterima redaksi selambat-lambatnya akhir Mei 2011. Untuk setiap edisinya redaksi akan memilih tiga orang yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari **Pembaruan Tani**. Nama pemenang edisi kali ini akan diumumkan pada **Pembaruan Tani** edisi 87, Juni 2011.

KAMUS PETANI



Agroekologi: Penerapan konsep dan prinsip ekologi dalam merancang dan mengelola keberlanjutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem pertanian yang berkeadilan

Biodiversitas: Keanekaragaman Makhluk Hidup.

Ekologi: Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya)

GMO's (Genetically Modified Organisms): Merupakan organisme hasil rekayasa genetis, baik itu berupa tumbuhan ataupun hewan. SPI dan La Via Campesina menolak keras penerapan GMO's karena lebih banyak memberikan kerugian bagi petani.

Transgenik: Teknologi persilangan antar gen makhluk hidup.

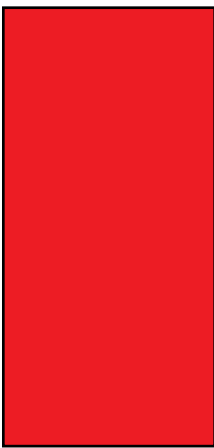
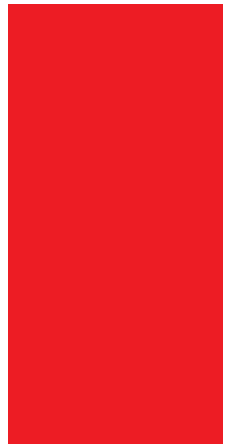
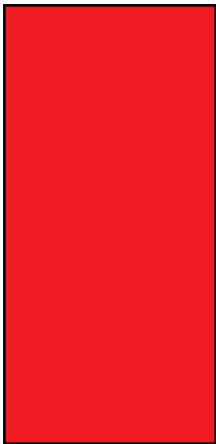
TNC's (Trans National Companies): Perusahaan Transnasional, biasanya merujuk kepada perusahaan-perusahaan besar lintas negara.

World Social Forum (Forum Sosial Dunia): Merupakan forum tempat berkumpulnya seluruh gerakan sosial di seluruh dunia untuk membahas alternatif-alternatif dunia yang bebas dari sistem kapitalisme dan neoliberalisme yang saat ini sudah sangat mendominasi dunia.

WTO (World Trade Organization): Organisasi Perdagangan Dunia. WTO berpihak kepada kepentingan pasar dan perusahaan besar transnasional.

KUPON TTS Pembaruan Tani
003

Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia



KIRI-KANAN:

Indah Sukmaningsih (*Institute of Global Justice-IGJ*), Henry Saragih (Ketua Umum SPI- Koordinator Umum La Via Campesina), Gunawan (*Indonesia Human Right Committee for Social Justice-IHCS*), Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia-API), Sutrisno Sastromiharjo (Serikat Buruh Indonesia-SBI), Martinus Sinani (Ketua DPW SPI Nusa Tenggara Timur, pembaca deklarasi Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia). Risma Umar (Solidaritas Perempuan), Berry Nahdian Furqan (Wahana Lingkungan Hidup-Walhi), Budi Laksana (Serikat Nelayan Indonesia-SNI). Mereka semuanya mewakili gerakan masyarakat sipil Indonesia yang mendeklarasikan Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, di Taman Menteng, Jakarta (24/02/'11). Rebut Kembali Kedaulatan Pangan Kita!!!



Untuk Merebut Kembali Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, silahkan klik dan tandatangani :

<http://www.petitiononline.com/daulat>